

# **ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

## ***REGIONAL ANALYSIS OF REVENUE EAST DISTRICT KUTAI***

*Suzanty Usman<sup>1</sup>, Elfreda Aplonia Lau<sup>2</sup>, Titin Ruliana<sup>3</sup>*

**Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

### **ABSTRACT**

Enabling Autonomy, according to Law No. 32 of 2004, local autonomy rights, authorities, and obligations of autonomous regions to set up and manage their own affairs and interests of local communities in accordance with the regulations, undang. Pendapatan (PAD) is the income collected Regional Regional Regulation in accordance by legislation No. 34 Year 2000 revenue (PAD) sourced from Local Taxes, Levies, the results of which are separated regional wealth management, and other legitimate PAD (includes proceeds from the sale of regional assets are not separated, current accounts, interest income, exchange gain the rupiah against foreign currencies and commissions, discounts, or other forms as a result of the sale and or procurement of goods or services by Regions). Based on the background that has been described previously, the research problems can be formulated as follows:

1. Is Local Tax contributes very well to the East Kutai Regency PAD for 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
2. Do Levies contributed very well to the PAD Kutai Timuruntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
3. Is the Company's Profit Regions contribute very well to the PAD Kutai Timuruntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
4. Are Other legitimate PAD contribute very well to the PAD Kutai Timuruntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
5. Are Taxes East Kutai Regency very efektifuntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
6. Do Levies East Kutai very efektifuntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
7. Does the Company's Profit East Kutai Regency very efektifuntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?
8. Are Other legitimate PAD East Kutai very efektifuntuk 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013?

The main theory used in this research is the management keuangan. Alat analysis used in this research is the analysis of the contribution and effectiveness ratio analysis.

The results of this study indicate that the contribution of local taxes, levies, profit regional companies and others local revenues legitimate, after doing the testing concluded in general the contribution rate of local taxes, levies, profit regional companies, and others eligible PAD does not reach the level very good category. Unless the contribution rate deodorized legitimate PAD in 2009 to reach the very good category. The effectiveness of local taxes, levies, profit regional companies, and others of local revenue legitimate, once categorized in the criteria for effectiveness set by the Ministry, it can be concluded that the overall level of effectiveness in the category very effective for local taxes, levies and others PAD legitimate.

**Keyword Contribution, Effectiveness, PAD**

## ABSTRAKSI

Pemberlakuan Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 34 Tahun 2000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah). Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
2. Apakah Retribusi Daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
3. Apakah Laba Perusahaan Daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
4. Apakah Lain-lain PAD yang sah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
5. Apakah Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
6. Apakah Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
7. Apakah Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
8. Apakah Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis rasio efektivitas.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, setelah di lakukan pengujian disimpulkan secara umum tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lainlain PAD yang sah tidak mencapai tingkat kategori yang sangat baik. Kecuali tingkat kontribusi lainlain PAD yang sah tahun 2009 yang mencapai kategori sangat baik. Efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah, setelah di kategorikan dalam kriteria efektifitas yang ditetapkan oleh Departemen, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif untuk pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain PAD yang sah.

Kata Kunci Kontribusi, Efektivitas, PAD

### 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 34 Tahun 2000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah).

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

#### **a. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian bagian latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
2. Apakah Retribusi Daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
3. Apakah Laba Perusahaan Daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
4. Apakah Lain-lain PAD yang sah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
5. Apakah Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
6. Apakah Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
7. Apakah Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?
8. Apakah Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013?

#### **b. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
2. Mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk

tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

3. Mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi Laba Perusahaan Daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
4. Mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
5. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
6. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
7. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
8. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

### c. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

#### 1. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai efektivitas penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan informasi mengenai target dan Realisasi Penerimaan Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur.

#### 2. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan Kontribusi teori sebagai bahan referensi dan sebagai data pendukung bagi peneliti-peneliti lainnya untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan khususnya pada bidang keuangan Pemerintah Daerah.

#### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi dalam mengambil kebijaksanaan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) guna Pembangunan Daerah, khususnya penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan pelaksanaan otonomi daerah.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya terhadap topik yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.

## 2. DASAR TEORI

### A. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi perusahaan yang penting bagi keberhasilan suatu usaha. Pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang efektif serta efisien sangat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Sutrisno (2009:3) mengemukakan manajemen keuangan sebagai berikut: "Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapat dana perusahaan dengan biaya-biaya yang murah serta usaha yang menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien".

Menurut James C. Van Horne, dan John M. Wachawicz Jr (2012:2) dalam bukunya "Prinsip –Prinsip Manajemen Keuangan" menjelaskan sebagai berikut: "Manajemen Keuangan (Financial Management) berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen aset."

### a. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan

Setiap perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan harus dapat menemukan tujuan yang harus dicapai.

Menurut Susan Irawati (2006:5) menyatakan bahwa fungsi manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya (*expense* atau *Cost*) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum, dalam menjalankan perusahaan kearah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau *survive* dan *expantion*. Tujuan manajemen keuangan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya di dalam perusahaan.

#### **b. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi dari operasional perusahaan, organisasi atau pemerintahan yang sangat penting diantara fungsi – fungsi operasional lainnya seperti manajemen sumberdaya manusia, manajemen strategi dan lain sebagainya.

Menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012:4) dalam bukunya “Dasar –Dasar Manajemen Keuangan” menjelaskan sebagai berikut :“Manajemen keuangan dapat diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan asset - aset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan manajemen aset”

Menurut Martono dan Agus (2010 : 4) adalah sebagai berikut :“Segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

#### **c. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah**

Manajemen Keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan public, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Manajemen

Pelayanan Publik yang dimaksud adalah pencerminan pemeberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari antara lain: Pemerintahan Umum, Pertanian; Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Energi; Kehutanan dan Perkebunan; Perindustrian dan Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan Sosial; Penataruangan; Pemukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan; Olahraga; Kepariwisata; dan Pertanian. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas – dinas daerah dan struktur organisasi Pemerintahan daerah yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut.

#### **d. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah**

Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama yaitu : adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur- unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari tugas :

- 1) Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
- 2) Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 3) Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;
- 4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;
- 5) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah; dan
- 6) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengendalian manajemen keuangan negara dalam arti luas adalah mencari sumber- sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta

pelaporan yang tepat waktu. Angka 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan dimana melekat pengertian adanya partisipasi publik; Angka 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan Angka 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan.

**e. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 tahun 2004). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas dari desentralisasi yang berarti bahwa penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004). Pelaksanaan ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut terutama peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah tersebut (Landiyanto, 2005).

**f. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

**g. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU

No.5 Tahun 1947 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

**1) Pajak Daerah**

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pengertian menurut beberapa ahli :Menurut Prof Dr Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Sumarsan, 2009:3).

**a. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair/Finansial*  
Fungsi *budgetair/finansial* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend/Fungsi Mengatur*  
Fungsi *regulerend/fungsi mengatur* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

**b. Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah**

Undang-undang No. 28 tahun 2009 menguraikan bahwa objek pajak daerah dan tarif pajak daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.1: Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah	Tarif Tertinggi
--------------	-----------------

1. Pajak Hotel	10%
2. Pajak Restoran	10%
3. Pajak Hiburan	20%
4. Pajak Reklame	25%
5. Pajak Penerangan Jalan	10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7. Pajak Parkir	30%
8. Pajak Air Tanah	20%
9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5%
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,5%

**c. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan /atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
7. Pajak Parkir  
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah  
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet  
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah

kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan perdalaman dan /atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan /atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

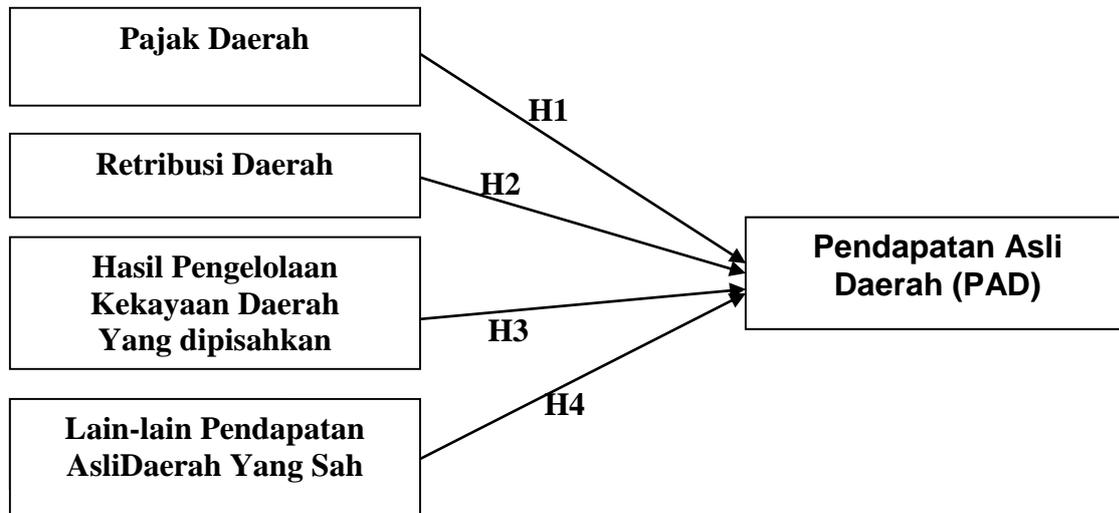
## 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim, 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Lain-Lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

## B. Kerangka Konsep

Gambar 2.1. Kerangka Konsep



## C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat baik terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
2. Retribusi Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
3. Laba Perusahaan Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
4. Lain-lain PAD yang sah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
5. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
6. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
7. Tingkat efektivitas Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat

efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

8. Tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

## 3. METODE PENELITIAN

### A. Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur, Variabel Independen Pertama adalah Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur, Variabel Independen kedua adalah Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur, Variabel Independen ketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Variabel Independen keempat adalah Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lainnya, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Merupakan penerimaan daerah dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagian Laba Usaha Milik Daerah (BLUMD) dan pendapatan lain-lain yang sah (PLL), tahun 2010-2014 yang diukur dengan satuan rupiah.

## 2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum". "Dapat di paksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera.

## 3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh penda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

## 4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menurut Halim (2004 : 68), "Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan".

## 5. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lainnya, menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- 1) Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Penerimaan jasa giro.
- 3) Penerimaan bunga deposito.
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah.

## B. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis rasio efektivitas.

### 1. Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

- a) Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004a):

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b) Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan formula (Mahmudi, 2005):

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

### 2. Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

- a) Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004a):

$$K_{RD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b) Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektifitas retribusidaerah dapat dihitung dengan formula (Mahmudi, 2005):

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi Daerah}}{\text{Target retribusi Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Laba Perusahaan Daerah

- a) Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Laba perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan labaperusahaandaerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004a):

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{K_{PD} \text{ Realisasi Laba Perusahaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b) Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektifitas labaperusahaandaerah dapat dihitung dengan formula (Mahmudi, 2005):

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Laba Perusahaan Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

### 4. Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD yang sah

- a) Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004a):

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{K_{PD} \text{ Realisasi Penerimaan lain-lain pendapatanyang sah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b) Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektifitas lain-lain pendapatan yang sah dapat dihitung dengan formula (Mahmudi, 2005):

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Lain-lain pendapatanyang sah}}{\text{Target Lain-lain Pendapatanyang sah Daerah}} \times 100\%$$

### C. Kriteria Kontribusi dan kriteria Efektivitas

Hasil analisis kontribusi dan efektivitas kemudian diuji/dikonforntasikan dengan kriteria kontribusi dan kriteria efektivitas yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri ( Depdagri ) yang ditetapkan dalam Kepmendagri No 690. 900. 327 tahun 1996.

Tabel 3.1  
Kriteria Efektivitas

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kempendagri No 690. 900. 327 tahun 2006 ( Dalam Anggraini,2015)

Tabel 3.2  
Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria
>50%	Sangat baik
>40,10%-50%	Baik
>30,10% - 40%	Cukup baik
>20,10% - 30%	Sedang
>10,10% - 20%	Kurang
>0,00% - 10%	Sangat kurang

Sumber : Depdagri, Kempendagri No 690. 900. 327 tahun 2006 ( Dalam Anggraini,2015)

#### D. Pengujian Hipotesis

Hipotesis diterima jika

1. Pajak Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat baik terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
2. Retribusi Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
3. Laba Perusahaan Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
4. Lain-lain PAD yang sah berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
5. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
6. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
7. Tingkat efektivitas Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat

efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

8. Tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Hipotesis ditolak jika

1. Pajak Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
2. Retribusi Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat kurang terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
3. Laba Perusahaan Daerah kabupaten Kutai Timur berkontribusi sangat kurang terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
4. Lain-lain PAD yang sah berkontribusi sangat kurang terhadap PAD kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
5. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
6. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak efektif

untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

7. Tingkat efektivitas Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.
8. Tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur tidak efektif untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013.

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai instansi yang menangani keuangan daerah, dalam mencapai tujuannya, memiliki Visi dan Misi, sebagaimana berikut ini :

##### B. Visi dan Misi

###### 1. VISI

Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

###### 2. MISI

- a) Menggali Sumber Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah.
- b) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan cepat dan tepat melalui Aparatur yang professional.
- c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

###### a) Tahun 2009

Efektivitas pajak daerah =  $\frac{7.679.497.861,00}{3.155.000.000,00} \times 100\% = 243,41\%$

###### b) Tahun 2010

Efektivitas pajak daerah =  $\frac{4.772.008.197,00}{4.005.000.000,00} \times 100\% = 119,15\%$

###### c) Tahun 2011

Efektivitas pajak daerah =  $\frac{22.904.548.111,25}{28.860.000.000,00} \times 100\% = 79,36\%$

###### d) Tahun 2012

Efektivitas pajak daerah =  $\frac{26.395.611.314,60}{31.910.000.000,00} \times 100\% = 82,72\%$

###### e) Tahun 2013

Efektivitas pajak daerah =  $\frac{36.776.099.319,12}{24.920.000.000,00} \times 100\% = 147,58\%$

- d) Menerapkan Sistem Penetapan Pajak dan Retribusi berazaskan Self Assesment dan Official Assesment.
- e) Pengintensifikasikan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui kegiatan Penagihan Secara Terpadu.

#### 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis

Pada penelitian dengan judul “ Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur “, maka untuk menjawab rumusan masalah atau permasalahan yang ada, pada bab V (Lima) ini akan dilakukan analisa lebih mendalam dari kontribusi dan efektivitas terhadap sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur periode 2010 – 2014 sebagai berikut :

##### 1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah( Halim, 2002: 129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Daerah} = \frac{\text{Analisis Efektifitas Pajak Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 5.1**  
**Kriteria Efektivitas Pajak Daerah**  
**Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013**

Tahun	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2009	243,41%	Sangat Efektif
2010	119,15%	Sangat efektif
2011	79,36%	Kurang efektif
2012	82,72%	Cukup efektif
2013	147,58%	Sangat efektif

Sumber : Data diolah

**2. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Timur**

Dengan Analisis efektifitas retribusi daerah akan didapatkan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan retribusi daerah

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah( Halim, 2002: 129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{EfektivitasRetribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

**a) Tahun 2009**

$$\text{Efektivitas retribusi daerah} = \frac{9.490.554.858,15}{5.631.000.000,00} \times 100\% = 168,54\%$$

**b) Tahun 2010**

$$\text{Efektivitas retribuis daerah} = \frac{7.644.419.829,00}{7.231.000.000,00} \times 100\% = 105,72$$

**c) Tahun 2011**

$$\text{Efektivitas retribusi daerah} = \frac{6.454.706.227,74}{6.629.000.000,00} \times 100\% = 97,37$$

**d) Tahun 2012**

$$\text{Efektivitas retribusi daerah} = \frac{8.640.080.843,00}{6.994.000.000,00} \times 100\% = 123,54\%$$

**e) Tahun 2013**

$$\text{Efektivitasretribusidaerah} = \frac{7.509.174.846,00}{3.231.000.000,00} \times 100\% = 232,41\%$$

**Tabel 5.2**  
**Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013**

Tahun	Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria Efektivitas
-------	------------------------------	----------------------

2009	168,54%	Sangat efektif
2010	105,72%	Sangat efektif
2011	97,37%	Efektif
2012	123,54%	Sangat efektif
2013	232,41%	Sangat efektif

Sumber : Data diolah

### 3. Analisis Efektivitas Laba Perusahaan Daerah kabupaten Kutai Timur

Analisis efektifitas Laba perusahaan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan pendapatan Laba perusahaan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002: 129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Laba Perusahaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Laba perusahaan Daerah}}{\text{Target Laba perusahaan Daerah}} \times 100\%$$

#### a) Tahun 2009

$$\text{Efektivitas Laba Perusahaan Daerah} = \frac{4.612.275.602,51}{23.500.000.000,00} \times 100\% = 19,63\%$$

#### b) Tahun 2010

$$\text{Efektivitas Laba Perusahaan Daerah} = \frac{28.147.906.144,91}{28.094.458.900,00} \times 100\% = 100,19\%$$

#### c) Tahun 2011

$$\text{Efektivitas Laba Perusahaan Daerah} = \frac{3.151.317.483,96}{3.401.317.483,96} \times 100\% = 92,65\%$$

#### d) Tahun 2012

$$\text{Efektivitas Laba Perusahaan Daerah} = \frac{2.919.390.893,65}{2.919.390.894,00} \times 100\% = 100\%$$

#### e) Tahun 2013

$$\text{Efektivitas Laba Perusahaan Daerah} = \frac{5.358.832.331,07}{3.300.000.000,00} \times 100\% = 162,39\%$$

Tabel 5.3

Kriteria Efektivitas Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013

Tahun	Efektivitas Laba Perusahaan Daerah	Kriteria Efektivitas
2009	19,63%	Tidak efektif
2010	100,19%	Sangat efektif
2011	92,65%	Efektif
2012	100%	Efektif

2013	162,39%	Sangat efektif
------	---------	----------------

Sumber : Data diolah

#### 4. Analisis Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah kabupaten Kutai Timur

Analisis efektifitas Lain-lain PAD yang sah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan Lain-lain

PAD yang sah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah( Halim, 2002: 129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Lain-lain PAD yang sah} = \frac{\text{Realisasi Lain-lain PAD yang sah}}{\text{Target Lain-lain PAD yang sah}} \times 100\%$$

##### a) Tahun 2009

$$\text{Efektivitas Lain-lain PAD yang sah} = (49.481.528.205,11 : 27.000.000.000,00) 100\% = 183,26\%$$

##### b) Tahun 2010

$$\text{Efektivitas Lain-lain PAD yang sah} = (7.644.419.829,00 : 27.000.000.000,00) 100\% = 83,09\%$$

##### c) Tahun 2011

$$\text{Efektivitas Lain-lain PAD yang sah} = (20.687.843.703,37 : 16.000.000.000,00) 100\% = 129,30\%$$

##### d) Tahun 2012

$$\text{Efektivitas Lain-lain PAD yang sah} = (27.924.020.974,78 : 23.538.548.152,00) 100\% = 118,63\%$$

##### e) Tahun 2013

$$\text{Efektivitas Lain-lain PAD yang sah} = (30.389.494.752,64 : 36.020.900.000,00) 100\% = 84,37\%$$

Tabel 5.4

Kriteria Efektivitas Lain-Lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013

Tahun	Rasio Efektivitas Lain-Lain PAD Yang Sah	Kriteria Efektivitas
2009	183,26%	Sangat efektif
2010	83,09%	Cukup efektif
2011	129,30%	Sangat efektif
2012	118,63%	Sangat efektif
2013	84,37%	Cukup efektif

Sumber : Data diolah

#### 5. Analisis Kontibusi Pajak Daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur

Analisis kontribusi Pajak Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan

dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah ( Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**a) Tahun 2009**

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = (4.612.275.602,51: 71.263.856.526,77 ) 100\% = 11\%$$

**b) Tahun 2010**

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = (4.772.008.197,00: 62.998.716.992,09 ) 100\% = 8\%$$

**c) Tahun 2011**

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = (22.904.548.111,25: 53.198.415.526,32 ) 100\% = 43\%$$

**d) Tahun 2012**

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = (26.395.611.414,60: 65.879.104.026,03 ) 100\% = 40\%$$

**e) Tahun 2013**

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = (36.776.099.319,12: 80.033.601.248,83) 100\% = 46\%$$

**6. Analisa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur**

Tabel 5.5  
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah  
Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria Kontribusi
2009	11%	Kurang
2010	8%	Sangat Kurang
2011	43%	Baik
2012	40%	Cukup baik
2013	46%	Baik

Analisa kontribusi retribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah, maka dibandingkan

antara realisasi retribusi daerah terhadap realisasi PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi retribusi daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**a) Tahun 2009**

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = (9.490.554.858,15: 71.263.856.526,77 ) 100\% = 13\%$$

**b) Tahun 2010**

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} =$$

(7.644.419.829,00: 62.998.716.992,09 ) 100% =12%

**c) Tahun 2011**

Kontribusi Retribusi Daerah =  
(6.454.706.227,74: 53.198.415.526,32 ) 100% = 12%

**d) Tahun 2012**

Kontribusi Retribusi Daerah =  
(8.640.080.843,00: 65.879.104.026,03 ) 100% = 13%

**e) Tahun 2013**

Kontribusi Retribusi Daerah =  
(7.509.174.846,00: 80.033.601.248,83 ) 100% = 9%

Tabel 5.6

Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah  
Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013

Tahun	Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria Kontribusi
2009	13%	Kurang
2010	12%	Kurang
2011	12%	Kurang
2012	13%	Kurang
2013	9%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah

**7. Analisa Kontribusi Laba Perusahaan Daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur**

Analisis kontribusi Laba perusahaan Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Laba perusahaan Daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi

penerimaan Laba perusahaan Daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Laba Perusahaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Laba perusahaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**a) Tahun 2009**

Kontribusi Laba Perusahaan Daerah =  
(4.612.275.602,51: 71.263.856.526,77 ) 100% = 6%

**b) Tahun 2010**

Kontribusi Laba Perusahaan Daerah =  
(28.147.906.144,91: 62.998.716.992,09 ) 100% =45%

**c) Tahun 2011**

Kontribusi Laba Perusahaan Daerah =  
(3.151.317.483,96: 53.198.415.526,32 ) 100% = 6 %

**d) Tahun 2012**

Kontribusi Laba Perusahaan Daerah =  
(2.919.390.893,65: 65.879.104.026,03 ) 100% = 4%

**e) Tahun 2013**

Kontribusi Laba Perusahaan Daerah =  
(5.358.832.331,07: 80.033.601.248,83 ) 100% = 7%

Tabel 5.7 Kriteria Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013

Tahun	Kontribusi Laba Perusahaan Daerah	Kriteria Kontribusi
2009	6%	Sangat kurang
2010	45%	Baik
2011	6%	Sangat kurang
2012	4%	Sangat kurang
2013	7%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah

### 8. Analisa Kontribusi Lain-Lain PAD yang sah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur

Analisis kontribusi Lain-lain PAD yang sah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan

asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah ( Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Lain-Lain PAD yang sah} = \frac{\text{Realisasi Lain-lain PAD yang sah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

#### a) Tahun 2009

$$\text{Kontribusi Laba Perusahaan Daerah} = (49.481.528.205,11 : 71.263.856.526,77) \times 100\% = 6\%$$

#### b) Tahun 2010

$$\text{Kontribusi Laba Perusahaan Daerah} = (22.434.382.821,18 : 62.998.716.992,09) \times 100\% = 36\%$$

#### c) Tahun 2011

$$\text{Kontribusi Laba Perusahaan Daerah} = (20.687.843.703,37 : 53.198.415.526,32) \times 100\% = 39\%$$

#### d) Tahun 2012

$$\text{Kontribusi Laba Perusahaan Daerah} = (27.924.020.974,78 : 65.879.104.026,03) \times 100\% = 42\%$$

#### e) Tahun 2013

$$\text{Kontribusi Laba Perusahaan Daerah} = (30.389.494.752,64 : 80.033.601.248,83) \times 100\% = 38\%$$

Tabel 5.8  
Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah

Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009-2013

Tahun	Kontribusi Lain-lain PAD Yang Sah	Kriteria Kontribusi
2009	69%	Sangat baik
2010	36%	Cukup baik
2011	39%	Cukup baik
2012	42%	Baik
2013	38%	Cukup baik

Sumber : Data diolah

### 9. Ringkasan Analisis Efektivitas

Tabel 5.9

Ringkasan Analisis Efektivitas sumber-sumber PAD kabupaten Kutai Timur

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Laba Perusaah Daerah		Lain-Lain PAD Yang Sah	
	Efektivitas (%)	Kriteria	Efektivitas (%)	Kriteria	Efektivitas (%)	Kriteria	Efektivitas (%)	Kriteria
2009	243,41%	Sangat Efektif	168,54%	Sangat efektif	19,63%	Tidak efektif	183,26%	Sangat efektif
2010	119,15%	Sangat efektif	105,72%	Sangat efektif	100,19%	Sangat efektif	83,09%	Cukup efektif
2011	79,36%	Kurang efektif	97,37%	Efektif	92,65%	Efektif	129,30%	Sangat efektif
2012	82,72%	Cukup efektif	123,54%	Sangat efektif	100%	Efektif	118,63%	Sangat efektif
2013	147,58%	Sangat efektif	232,41%	Sangat efektif	162,39%	Sangat efektif	84,37%	Cukup efektif

Sumber : Data diolah

### 10. Ringkasan Analisis Kontribusi

Tabel 5.10

Ringkasan Analisis Kontribusi sumber-sumber PAD kabupaten Kutai Timur

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Laba Perusaah Daerah		Lain-Lain PAD Yang Sah	
	Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria	Kontribusi (%)	Kriteria
2009	11%	Kurang	13%	Kurang	6%	Sangat kurang	69%	Sangat baik
2010	8%	Sangat Kurang	12%	Kurang	45%	Baik	36%	Cukup baik
2011	43%	Baik	12%	Kurang	6%	Sangat kurang	39%	Cukup baik

2012	40%	Cukup baik	13%	Kurang	4%	Sangat kurang	42%	Baik
2013	46%	Baik	9%	Sangat kurang	7%	Sangat kurang	38%	Cukup baik

Sumber : Data diolah

## A. Pembahasan

### 1. Efektivitas Pajak Daerah

Hasil analisis efektivitas pajak daerah memperlihatkan bahwa selama tiga tahun, yakni tahun 2009, 2010 dan 2013, pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur mampu melampaui target. Artinya penerimaan daerah yang didapatkan dari sumber pendapatan pajak daerah pada tiga tahun dimaksud melampaui target. Meskipun tahun 2011 dan tahun 2012 pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber pendapatan pajak daerah tidak mencapai target.

### 2. Efektivitas Retribusi Daerah

Hasil analisis efektivitas retribusi daerah yang tertera pada tabel 5.2, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2009 sebesar 168,51%, tahun 2010 sebesar 105,72%, tahun 2011 sebesar 97,37%, tahun 2012 sebesar 123,54% dan tahun 2013 sebesar 232,41%.

### 3. Efektivitas Laba Perusahaan Daerah

Hasil analisis efektivitas laba perusahaan daerah sebagaimana yang tersaji pada tabel 5.3, bahwa tingkat efektivitas laba perusahaan daerah tahun 2009 sebesar 19,63%, tahun 2010 sebesar 100,19%, tahun 2011 sebesar 92,65%, tahun 2012 sebesar 100%, dan tahun 2013 sebesar 162%.

### 4. Efektivitas Lain-Lain PAD yang sah

Hasil analisis efektivitas lain-lain PAD yang sah kabupaten kutai Timur tahun 2009-2013, yang tersaji pada tabel 5.4 adalah tingkat efektivitas pada tahun 2009 sebesar 183,26%, tahun 2010 sebesar 83,09%, tahun 2011 sebesar 129,30%, tahun 2012 sebesar 118,63% dan tahun 2013 sebesar 84,37%.

### 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur

Hasil analisis kontribusi pajak daerah kabupaten Kutai Timur terhadap PAD kabupaten Kutai Timur tahun 2009 – 2013 sebagaimana yang tersaji dalam tabel 5.5, menunjukkan bahwa pada tahun 2009 kontribusi pajak daerah sebesar 11%, tahun 2010 sebesar 8%, tahun 2011 sebesar 43%, tahun 2012 sebesar 40% dan tahun 2013 sebesar 46%. Hasil ini menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2013 pajak daerah tidak berkontribusi sangat baik terhadap PAD kabupaten Kutai Timur berdasarkan kriteria kontribusi yang diberikan oleh Depdagri, yang tertuang dalam Kepmendagri No. No 690. 900. 327, tahun 2006.

### 6. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur

Hasil analisis kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Timur tahun 2009-2013 yang tersaji pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah tahun 2009 sebesar 13%, tahun 2010 sebesar 12%, tahun 2011 sebesar 12%, 2012 sebesar 13% dan tahun 2013 sebesar 9%. Nilai kontribusi retribusi daerah ini menggambarkan bahwa dari tahun 2009 – 2013, tingkat kontribusi retribusi daerah tidak mencapai tingkat kriteria sangat baik. Artinya tingkat kriteri kontribusi tidak mencapai nilai >50% berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Depdagri, yang dituangkan dalam Kempendagri No 690. 900. 327, tahun 2006.

### 7. Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur

Hasil analisis kontribusi laba perusahaan daerah menunjukkan bahwa antara tahun 2009 – 2013, kontribusi laba perusahaan daerah tidak mencapai tingkat

kriteria baik, yakni >50,10%. Kontribusi laba perusahaan daerah kabupaten Kutai Timur terhadap PAD hanya bisa mencapai tingkat kriteria sangat kurang selama empat tahun dan hanya satu tahun mencapai tingkat kriteria baik.

#### **8. Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur**

Hasil analisis kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kutai Timur yang tersaji pada tabel 5.8, memperlihatkan tingkat kontribusi lain-lain PAD sebesar 69% pada tahun 2009, sedangkan di tahun 2010 sebesar 36%, tahun 2011 sebesar 39%, tahun 2012 sebesar 42%, dan tahun 2013 sebesar 38%.

#### **B. Pengujian Hipotesis**

Tingkat efektivitas laba perusahaan daerah kabupaten Kutai Timur berdasarkan hasil analisis efktivitas dan pengelompokkan dalam kriteria yang diberikan Depdagri, menunjukkan bahwa persentase efektivitas laba perusahaan daerah pada tahun 2009 sebesar 19,63%, masuk kategori tidak efektif, persentase efektivitas laba perusahaan daerah untuk tahun 2011 sebesar 92,65%, masuk kategori efektif, dengan demikian hipotesis yang mengatakan tingkat efektivitas laba perusahaan daerah kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2009 dan tahun 2011 sangat efektif, ditolak. Hasil analisis efektivitas laba perusahaan daerah kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa persentase efektivitas laba perusahaan daerah untuk tahun 2010 sebesar 100,19%, masuk kategori sangat efektif, tahun 2012 sebesar 100%, masuk kategori sangat efektif, dan tahun 2013 sebesar 162%, masuk kategori sangat efektif, dengan demikian hipotesis yang mengatakan tingkat efektivitas laba perusahaan daerah kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2010, 2012 dan 2013, diterima.

Tingkat efektivitas lain-lain PAD yang sah berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kemudian dikelompokkan dalam kriteria efektivitas yang dikeluarkan oleh Depdagri, menunjukkan bahwa

persentase efektivitas lain-lain PAD yang sah tahun 2009 sebesar 183,26%, masuk kategori sangat efektif, tahun 2011 sebesar 129,30%, masuk kategori sangat efektif, dan tahun 2012 sebesar 118,63%, masuk kategori sangat efektif, dengan demikian hipotesis yang mengatakan tingkat efektivitas lain-lain PAD yang sah kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2011 dan tahun 2012, diterima. Hasil analisis efektivitas lain-lain PAD yang sah menunjukkan bahwa persentase efektivitas lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2010 sebesar 83,09%, masuk kategori cukup efektif dan tahun 2013 sebesar 84,37%, masuk kategori cukup efektif, dengan demikian hipotesis yang mengatakan tingkat efektivitas lain-lain PAD yang sah kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2010 dan tahun 2013 ditolak. Hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak daerah pada tahun 2009 sebesar 11%, masuk kategori kurang; kontribusi pajak daerah tahun 2010 sebesar 8%, masuk kategori sangat kurang; tahun 2011 kontribusi pajak daerah sebesar 43%, masuk kategori baik; tahun 2012 kontribusi pajak daerah sebesar 40%, masuk kategori cukup baik; dan tahun 2013 kontribusi pajak daerah sebesar 46%, masuk kategori baik. Kategori kriteria kontribusi dikatakan sangat baik bila persentase kontribusi lebih besar dari 50%, dengan demikian hipotesis yang mengatakan kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten Kutai Timur sangat baik untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, ditolak.

### **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil penelitian efektivitas, kontribusi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kutai Timur tahun 2009 – 2013 dapat disimpulkan bahwa;

1. Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, setelah dikategorikan dalam kriteria kontribusi yang ditetapkan oleh

Departemen Dalam Negeri, maka disimpulkan bahwa secara umum tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak mencapai tingkat kategori sangat baik. Kecuali tingkat kontribusi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2009 yang mencapai kategori sangat baik.

2. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, setelah dikategorikan dalam kriteria efektivitas yang ditetapkan oleh Departemen, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif untuk pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.
3. Hipotesis yang mengatakan tingkat efektivitas lain-lain PAD yang sah Kabupaten Kutai Timur sangat efektif untuk tahun 2009, 2011, 2012 diterima dan untuk tahun 2010, 2013 ditolak.

#### **B. Saran**

Penulis mencoba menguraikan saran-saran agar menjadi bahan masukan dan dapat dipertimbangkan terutama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal meningkatkan efektivitas dan memproyeksikan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) oleh pihak-pihak terkait tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat menggali potensi penerimaan-penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang bertugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah serta pengelolaan dan pengawasan kembali sumber Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Kutai Timur.
2. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merealisasikan sumber-sumber penerimaan PAD yang telah ditargetkan sebelumnya harus ditingkatkan dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Khususnya sumber Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah Pemerintah daerah dapat Mengembangkan kerjasama dalam menggali penerimaan PAD yaitu dengan Pembentukan Persereon Daerah, dan Kebijakan umum anggaran.

*Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pasal 1 angka 3.*

, 2004. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.*

, 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi.* Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Baridwan, Zaki. 2001. *Intermediate Accounting.* Edisi Kedelapan. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim. 2003. *Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.* Pasal 64.

, 1999. *Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program*

- Daft, L. Richard. 2003. *Management*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gill, James O. Tanpa Tahun. *Dasar-dasar Analisis Keuangan*, Infomasi Keuangan untuk Semua Manajer. Terjemahan Eka Herawaty. 2004. Jakarta : PPM.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ilham, Muhammad. 2013. *Uji t dua sampel*. <http://freelearningji.wordpress.com/2013/04/06/uji-t-dua-sampel/> (diakses 3 Februari 2014)
- Junaidi. 2010. *Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05*. <http://junaidichaniago.wordpress.com> (diakses 3 Februari 2014)
- Kasmir. 2008. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Mendenhall dan Reinmuth.1982.*Statistik Untuk Manajemen dan Ekonomi*. Terjemahan N.Soemartojo. 2005. Edisi Keempat Jilid I. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mulyadie.2010. Analisis Laba Kotor antara Rencana dan Realisasi dari Penjualan Sepeda Motor Merk Mega Pro XP pada PT. Daya Anugerah Mandiri Tahun 2009.*Tugas Akhir*.Samarinda : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda.
- Munawir. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Liberty.
- Samian. 2008. *Uji Hipotesa Perbedaan*.<http://samianstats.files.wordpress.com/2008/10/uji-perbedaan-t-test.pdf>(diakses 30 Januari 2014).
- Sawir, Agnes. 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Simamora, Henry.2002. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suciyanti, Ulfa, dkk.2013. *Uji Beda*. E-Learning Statistika Pendidikan. <http://StatistikaPendidikan.com> (diakses 3 Februari 2014)
- Sule, Ernie Trisnawati, Kurniawan Saefulloh. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Yogyakarta : BPFE.
- Vianus, Eldy O. 2011. Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan (Kopkar) Ruwa Jurai PTPN VII (